

MAHALNYA TOLERANSI

Oleh. P. Peter B. Sarbini, SVD*

Pengantar

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini dunia disibukkan perilaku sebagian kelompok gerakan Islam yang mendukung dan mempraktikkan fanatisme serta radikalisme. Sebagian dari mereka mempratikkan ekstremisme, bahkan terorisme, atas nama jihad. Dengan demikian beberapa kalangan menuduh Islam tidak toleran, bahkan menghalalkan kekerasan atas nama agama. Tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam kemudian menyulut reaksi-reaksi keras dan negatif dari berbagai pihak.

Apakah tindakan di atas terjadi di kalangan Islam saja? Bagaimanakah dengan beberapa negara di dunia Barat yang selama ini masyarakatnya dikenal sangat toleran, menghargai kebebasan beragama, justru diwarnai intoleransi dan kekerasan? Prancis, misalnya melarang Muslimah mengenakan purdah dan peristiwa karikatur satire Nabi Muhammad SAW yang berujung kemarahan besar dengan penyerangan kantor redaksi Charlie Hebdo. Belanda tidak mau menerima dan melarang penyembelihan sapi dengan cara Islam yang dianggap mengerikan serta keji. Pembangunan menara masjid di Swiss juga dilarang.

Tulisan ini sekilas memberikan gambaran bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya tidak mengedepankan kekerasan dan bukan ajaran serta agama anti toleransi.

Kekerasan Mengatasnamakan Agama

Tragedi pengeboman gedung *World Trade Center* (WTC) 11 September 2001 oleh sekelompok teroris yang mengatasnamakan Islam membuat warga Amerika khususnya dan dunia pada umumnya membenci Islam, bahkan mereka takut bertetangga dengan orang Muslim. Hal ini dipaparkan oleh John L. Esposito dalam bukunya secara terperinci. Ia menyatakan bahwa dengan tragedi tersebut kemudian muncul pelbagai prasangka penduduk Amerika terhadap kaum Muslim. Peristiwa itu membuat mereka memerketat keamanan terhadap penduduk Muslim

sebagai cara untuk mencegah terorisme. Dalam jajak pendapat ditemukan bahwa 44% warga Amerika mengatakan kaum Muslim terlalu ekstrem dalam beragama. Hampir seperempat (22%) orang Amerika mengatakan bahwa mereka tidak ingin punya tetangga Muslim.

Peristiwa di atas dan berbagai serangan teroris berikutnya di negara-negara Muslim, Madrid, London, dan tempat-tempat lain semakin memperburuk keadaan. Kondisi ini pula yang menyebabkan banyak kalangan beranggapan bahwa Islam merupakan agama teroris dan pembuat onar.

Intoleransi agama tidak hanya terjadi di belahan dunia Barat, melainkan juga di Timur Tengah, yaitu di Irak dan Siria. Kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) merupakan kelompok radikal yang bercita-cita mendirikan Negara Islam di Irak dan Siria. Kelompok ini dipimpin oleh al-Baghdadi yang diklaim oleh para pengikutnya sebagai khalifah. Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpin ISIS, mulanya menggantikan para pemimpin ISIS yang pada saat itu masih merupakan cabang dari jaringan al-Qaida di Irak. Setelah para pemimpin sebelumnya, yakni az-Zarkawi dan Abu Umar al-Baghdadi tewas akibat serangan bom Amerika, kemudian Abu Bakar Al Baghdadi menyatukan beberapa organisasi jaringan Al Qaida di wilayah tersebut dalam satu kelompok yang dikenal dengan Da'isy (*ad-Daulah al-Islamiyah fi al-Iraq wa asy-Syam*). Da'isy inilah yang oleh media Barat dikenal dengan nama ISIS. Di bawah komando Al Baghdadi, kelompok ISIS menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Mereka tidak mentolerir siapapun yang berbeda paham. Abu Bakar Al Baghdadi dan para pengikutnya menerapkan syariat berdasarkan penafsiran mereka sendiri. Mereka tidak segan-segan memerangi siapa saja yang berbeda pandangan keagamaan, bahkan memerangi juga kelompok Al Qaida lainnya (*Jabhatu an-Nasrah*) yang dipimpin oleh az-Zawahiri yang tidak mengakui keberadaan kelompoknya.

Pembantaian kelompok-kelompok yang tidak sepaham ini bertujuan mendirikan Negara Islam yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar Al Baghdadi. Hal ini ditandai dengan diproklamirkannya sebuah kekhalifahan pada bulan Juli 2014 di wilayah-wilayah yang telah mereka kuasai. Semua aspek kehidupan di Negara Islam yang baru ini akan diatur sesuai dengan hukum Islam. Kelompok ISIS merekrut siapapun yang disebut sebagai pejuang. Dengan *iming-iming* atau menjanjikan surga, mereka berhasil mengumpulkan ribuan 'pejuang', termasuk warga Arab Saudi yang kini berada di Suriah.

Tindakan kekerasan atas nama agama dan intoleransi ini tidak hanya terjadi di dunia Barat dan Timur Tengah. Negara Indonesia pun tidak luput dari pelbagai peristiwa intoleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Beberapa peristiwa berikut ini membuktikan hal tersebut. Tragedi pembantaian jemaat Ahmadiyah dan kasus GKI Yasmin di Bogor merupakan tindakan pencorengan toleransi agama. Pelbagai aksi perusakan, penutupan dan larangan pengadaan tempat ibadah, penyerangan secara brutal terhadap umat beragama tertentu yang sedang berdoa, tindakan pengeboman di beberapa tempat di negara ini dan masih banyak tindakan kekerasan lainnya, bukankah semuanya itu mengarah kepada sikap intoleran? Memang tidak semua kejadian bermotifkan unsur agama. Aspek politik, ekonomi, sosial dan lainnya kadang ikut berperan di dalamnya.

Kelompok Fanatik Puritan dan Radikal

Secara historis, perilaku di atas tidak bisa dipisahkan dari ideologi atau pemikiran Ikhwan al-Muslimun dan Salafi (Wahabi). Kedua aliran ini menekankan purifikasi ajaran Islam dan pelaksanaannya secara ketat. Ideologi Salafi lebih menitikberatkan dan memfokuskan diri pada purifikasi keesaan Allah (tauhid *uluhiyyah* dan *rububiyyah*). Sedangkan pemikiran Ikhwan al-Muslimun lebih menekankan supremasi hukum Allah dalam Negara (tauhid *hakimiyyah*).

Di kalangan Ikhwan al-Muslimun bisa dibedakan antara faksi Hudaibiyyah (pengikut Hasan al-Hudaibi) dan faksi Quthbiyyah (pengikut Sayyid Quthb). Faksi pertama disebut faksi Ikhwan Tarbiyah yang merupakan faksi moderat atau agak moderat. Sedangkan faksi kedua adalah faksi radikal. Di antara pengikut aliran Quthbiyyah ini ada yang memisahkan diri atau menyempal dan membentuk gerakan ekstrem, yang kemudian dianggap sebagai Ikhwan Jihadi, yaitu Jama'ah Islamiyyah, Tanzim al-Jihad (*Al Jihad al-Islami*), dan Al-Takfir wal-Hijrah. Ikhwan Jihadi ini dianggap tidak sejalan dengan ideologi Ikhwan *mainstream*.

Sementara di kalangan Salafi, baik faksi dakwah (bagian dari Wahabi) maupun faksi politik atau *Sururi* (pengikut Muhammad Surur), juga masih bisa dianggap agak moderat meskipun bertendensi puritan yang fanatik dan menganggap kelompok lain sebagai bid'ah dan syirik. Di antara kelompok Salafi ini ada juga faksi yang ekstrem, yang disebut Salafi Jihadi. Faksi ini pun dianggap tidak sejalan dengan sistem Salafi *mainstream*.

Secara umum, pimpinan Al Qaeda (Abdullah Azzam, Osamah bin Laden, dan kini Ayman al-Zawahiri) merupakan pengikut ideologi Ikhwan Jihadi dan Salafi Jihadi. Saat ini, ideologi Jihadi sudah menyebar ke seluruh dunia. Kelompok Jihadi dapat dijumpai di banyak negara dengan berbagai sebutan atau nama, seperti NIIS / ISIS, Taliban, Al-Shabab, Boko Haram, dan Mujahidin Asia Tenggara.

Sebagaimana di negara-negara mayoritas Muslim lainnya, kelompok fanatik puritan, radikal, atau ekstrem ini juga muncul di Indonesia, utamanya pada era reformasi yang mendukung kebebasan. Hal ini mengakibatkan munculnya sejumlah kasus ketegangan, intoleransi, dan konflik horizontal dalam masyarakat. Bahkan, muncul juga konflik vertikal antara kelompok ekstremis atau Jihadi dan negara dalam bentuk terorisme.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menentang keras gerakan fundamentalisme agama. Kelompok fundamentalis Islam di Indonesia merupakan bagian dari gerakan transnasional yang diusung ideologi Salafi dari Arab Saudi. Melalui kelompok Wahabi dan Ikhwanul al-Muslimun, ideologi ini melancarkan agresinya ke Nusantara melalui kelompok-kelompok lokal. Tujuan akhir mereka ialah menjadikan Indonesia sebagai bagian dari Khilafah Islamiyah internasional dan tentunya mendirikan Negara Islam di Indonesia. Gerakan ini juga menolak sistem demokrasi di Indonesia yang dianggap sebagai bagian dari produk Barat. Selain itu mereka menentang Pancasila karena dianggap tidak sejalan dengan kaidah Islam.

4. Toleransi dalam Alquran dan Hadis

Toleransi bukan sekedar permasalahan agama, melainkan mencakup banyak hal dan memiliki makna sangat luas. Sally Wehmeier dan Michael Ashby mengartikan toleransi adalah “..... *the willingness to accept especially opinions or behavior that you may not agree with, or people who are not like you.....*”

Pernyataan serupa ditegaskan oleh Jean L. McKechnie, yaitu “*Tolerance: tolerating or being tolerant, especially of others views, beliefs, practices, etc.....to recognize and respect (others beliefs, practices, etc.) without necessarily agreeing or sympathizing.....Tolerance, specifically, freedom to hold religious views that differ from the established ones*”.

Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Susan Mendus dalam bukunya, *Toleration and the Limit of Liberalism*, membagi toleransi menjadi dua macam. Pertama, toleransi negatif (*negative interpretation of tolerance*) yang hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang/ kelompok lain. Kedua, toleransi positif (*positive interpretation of tolerance*) meliputi kerja sama dan bantuan dengan kelompok lain. Toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan (*harmony*).

Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan umat beragama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sikap dan perilaku umat beragama, serta kebijakan negara/ pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan, sikap saling menghargai dan toleransi sehingga secara ideal agama berfungsi sebagai faktor integratif.

Tanpa toleransi, masyarakat akan selalu berada dalam suasana konfliktnal yang destruktif, saling bermusuhan, penuh arogansi dan tidak stabil. Pemahaman toleransi dalam kehidupan sehari-hari sering dikaitkan dengan penghargaan terhadap agama atau keyakinan yang beraneka ragam. Toleransi agama bukan sekedar toleransi pada agama-agama tertentu, tetapi toleransi terhadap seluruh eksistensi dari agama-agama lain, baik penganut, aktivitas, maupun hal-hal yang ada dalam agama itu sendiri. Artinya, toleransi beragama merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap aktivitas beragama yang berlandaskan penerimaan dan penghargaan serta keterbukaan terhadap keyakinan atau kepercayaan yang lain. Toleransi antarumat beragama sangat diperlukan agar masing-masing pihak saling mengendalikan diri dan menghormati keunikan masing-masing. Sikap toleran harus ditumbuhkembangkan dalam kehidupan antarumat beragama sehingga terciptalah kehidupan damai.

Toleransi dalam bahasa Arab disebut *al-tasamuh* atau *al-samhah*. Meskipun secara tersirat, kata toleransi tidak terdapat dalam Alquran, namun sering dikaitkan dengan kasih (*rahman*), kebijaksanaan (*hikmah*), kemaslahatan/kesejahteraan atau kebaikan universal (*maslahahummah*), dan keadilan (*adl*). Toleransi beragama muncul karena keberagaman agama. Alquran tidak bertentangan dengan keberagaman agama. Hal ini terjadi karena Islam mengakui Tuhan yang universal. Artinya, Tuhan tidak dimiliki secara eksklusif oleh golongan atau agama

tertentu. Agama-agama mencari dan menyembah Allah Yang Esa. Islam mengajarkan dan mengakui bahwa agama-agama yang ada dikehendaki oleh Allah sendiri. Karena itu Islam menghargai dan menghormati agama-agama lain.

Penghormatan dan penghargaan terhadap agama lain diajarkan dalam Islam. Alquran secara tegas dan jelas mengajarkan hal ini dengan melarang keras umat Islam menghina keyakinan dan symbol-simbol kesucian agama lain. Untuk itu Allah berfirman :

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan (QS. Al Anam [6] : 108).

Apabila kata atau istilah toleransi memiliki makna sikap saling menghargai, menghormati, menerima perbedaan-perbedaan, baik kepercayaan maupun lainnya, maka dalam Alquran terdapat banyak indikasi dan pandangan yang memperlihatkan toleransi. Ayat-ayat suci Alquran berikut ini menunjukkan hal itu, yakni surra Al-Baqarah [2]: 256, QS. al-Kahf [18]: 29, QS. Al-Hajj [22]: 40, QS. al-Muhtahanah [60]: 8-9, QS al-Hujarat [49]: 10. Beberapa surra berikut ini dalam Alquran menyatakan semangat toleransi, antara lain Surra Luqman (QS. [31]: 15), QS. al-Mumtahanah (QS. [60]: 8, QS. al-Insan [76]: 8, QS al-Baqarah [2]: 272).

Sikap-sikap toleran dengan sangat indah juga digambarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hadis Riwayat Imam Muslim menulis, “*Sesungguhnya saya (Nabi Muhammad SAW) tidak diutus sebagai pemberi laknat, tapi saya diutus untuk memberi rahmat*”. Dalam Hadis Riwayat Thabrani dikisahkan bahwa Nabi Muhammad menasehati orang supaya tidak marah. Tuhan menghendaki manusia saling mengasihi. Hadis Riwayat Muhammad bin ‘Adi mengisahkan, “*Allah berfirman: Jika kalian mengharapkan rahmat-Ku, maka kasihilah makhluk-Ku.*” Demikian juga Hadis Riwayat Turmudzi menyatakan, “*Mereka yang menebarkan kasih sayang, niscaya dikasihi Yang Maha Kasih. Kasihilah mereka yang hidup di bumi, niscaya Tuhan yang berada di langit mengasihi kalian*”.

Dengan mencermati beberapa ayat dan hadis di atas, maka tidak ada alasan untuk melakukan bahkan melegalkan tindakan kekerasan atas nama agama, intoleransi dan sebagainya.

Dalam ajaran Islam terdapat sikap positif terhadap keberagaman. Islam tidak membenci perbedaan dan tidak memaksakan secara radikal apa yang diyakini dan dianut pihak lain. Pertanyaannya, dari manakah datangnya intoleransi, terorisme dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya?

Di dalam Al Quran ada beberapa ayat yang menunjukkan misi agama Islam, karakteristik ajaran dan umat Islam. Misi Islam adalah sebagai pembawa dan penabur rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*) : QS Al-Anbiya' : 107. Adapun karakteristik ajaran Islam ialah agama yang sesuai dengan kemanusiaan (QS Al-Rum : 30), sedangkan karakteristik umat Islam adalah umat yang moderat, toleran, tidak mengedepankan `brutalisme` (QS Al-Baqarah : 143). Selain itu, dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang memerintahkan agar umat Islam berpihak pada kebenaran (QS Al-Rum :30), menegakkan keadilan (QS Al-Maidah :8), dan kebaikan agar menjadi umat terbaik (QS Ali 'Imran : 110).

Ayat-ayat ini memperkuat perlunya beragama dengan sikap toleran, inklusif dan moderat (*tawassuth*). Pernyataan dan ajakan tersebut ditegaskan oleh Masykuri Abdillah, Guru Besar UIN Jakarta, yang mengatakan pentingnya rambu-rambu moderasi beragama. Ia mengutip gagasan ulama terkenal Yusuf al-Qaradhawi yang pernah mengungkapkan 30 rambu moderasi tersebut. Berikut ini dikutip beberapa rambu moderasi dalam beragama, yaitu:

1. Pentingnya memahami Islam secara komprehensif, tidak parsial
2. Keseimbangan antara ketetapan syariah dan perubahan zaman
3. Dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan
4. Pengakuan akan pluralitas agama, budaya, dan politik
5. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas

Menurut Masykuri Abdillah, para intelektual Muslim dan pengamat lebih banyak menggunakan kata moderasi ini untuk sikap atau perilaku umat Islam dari pada untuk menyifati (karakteristik) Islam itu sendiri. Lebih jauh dia menegaskan bahwa Islam adalah satu dengan sumber dasar yang sama, yakni Al Quran dan hadis. Jika dalam kenyataannya ada berbagai aliran, mazhab, dan orientasi politik yang berbeda-beda, hal ini disebabkan perbedaan pemahaman serta sikap keberagamaan dalam menghadapi realitas yang ada, baik di satu negara maupun di dunia internasional.

Beberapa Akar Intoleransi

The Wahid Institute mengumpulkan dan menyajikan data selama tiga tahun terakhir (2012-2014) berkaitan dengan tindakan kekerasan serta intoleransi umat beragama di Indonesia. Tahun 2012 terjadi 274 kasus intoleransi. Tahun 2013 kasus intoleransi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama mengalami penurunan, yaitu 245 kasus. Sedangkan tahun 2014, turun menjadi 158 kasus. Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan, bukan berarti intoleransi mudah diatasi. Berikut dari data tersebut dapat ditemukan beberapa akar penyebab intoleransi di negara kita.

1. Pemicu terjadinya intoleransi di berbagai daerah ialah lemahnya keberpihakan masyarakat dan pemerintah terhadap kelompok minoritas. Hal ini menyebabkan minoritas berkonflik dengan mayoritas sehingga kelompok minoritas sering dipaksa mengalah dan selalu termarginalkan. Peristiwa intoleransi di Kabupaten Singkil, Aceh, berupa penyegelan besar-besaran rumah ibadah oleh pemerintah setempat karena adanya desakan dari sejumlah ormas yang mengatasnamakan mayoritas. Peristiwa lain yang terjadi di Jawa Timur, warga Syiah terus menerus diteror dan mengalami kekerasan karena keyakinan mereka berbeda dengan *mainstream* di sana. Salah seorang warga Syiah tewas di Sampang dan puluhan lainnya luka-luka setelah diserang oleh orang-orang yang tidak toleran terhadap keyakinan mereka.
2. Maraknya politisasi isu agama di kalangan para elit lokal. Mereka berpandangan bahwa sentimen agama merupakan salah satu alat politik efektif yang digunakan untuk meraih dukungan mayoritas publik. Banyak kasus intoleransi terjadi di beberapa kabupaten dan kota justru menjelang perhelatan pilkada. Politisasi agama memanfaatkan idiom-idiom keagamaan yang secara langsung digunakan dalam perjuangan politik untuk meraih kekuasaan politik, baik pada ranah rasionalisasi, legitimasi, maupun manipulasi pesan-pesan ajaran demi kepentingan politik. Sebagian masyarakat khawatir menjelang pilkada karena akan ada sejumlah partai politik memolitisir simbol-simbol sosial termasuk agama, utamanya oleh partai-partai politik yang menjadikan agama sebagai identitas politiknya. Selain itu, ada tokoh

agama yang sudah mulai muncul sahwat politiknya untuk mencari kesempatan dan keberuntungan menjadi kepala daerah.

3. Konservatisme agama yang berkembang di masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena himpitan faktor ekonomi dan sosial, hilangnya keteladanan dari para pemimpin politik, serta merosotnya kepercayaan kepada pemerintah menyebabkan masyarakat mudah menerima gagasan-gagasan keagamaan konservatif karena menawarkan jalan keluar praktis. Konservatisme ini bukan satu-satunya penyebab mengapa Jawa Barat menjadi daerah dengan tingkat pelanggaran dan intoleransi tertinggi. Dalam banyak kasus pelanggaran dan intoleransi beragama di Jawa Barat merupakan akibat dari maraknya politisasi isu agama oleh para elit lokal. Banyak ditemukan kasus intoleransi di beberapa kabupaten dan kota justru menjelang perhelatan pilkada. Dalam kasus politisasi agama ini, isu Ahmadiyah dan tempat ibadah Kristen paling banyak muncul.
4. Negara (dalam hal ini diwakili polisi dan pemerintah) kerap kali bertindak sebagai pihak yang menghindari masalah dari pada menyelesaikannya, sehingga memicu kesan bahwa negara lebih berpihak pada mayoritas. Beberapa bentuk pelanggaran kebebasan beragama, seperti pelarangan tempat ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, kriminalisasi dan pemaksaan keyakinan hingga pembiaran oleh aparat selalu diawali dengan tindakan-tindakan intoleran dari sebagian masyarakat, polisi dan pemerintah daerah. Kedua institusi inilah yang paling banyak berhadapan dengan pelbagai problem keagamaan di lapangan. Pendekatan penanganan kasus-kasus keagamaan oleh kedua institusi ini menunjukkan trend pengelolaan hak-hak beragama di Indonesia cenderung membatasi daripada menjamin dan melindungi. Ketika terjadi konflik antara mayoritas dan minoritas agama misalnya, kedua institusi ini seringkali membatasi hak kelompok minoritas dengan alasan menghindari konflik yang lebih besar. Cara tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban negara menjamin setiap warganya untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya. Institusi di atas seharusnya lebih profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Siapa pun yang melanggar hukum dan mengatasnamakan agama harus ditindak sebagaimana mestinya.

5. Politik desentralisasi yang membuka peluang bagi berkembangnya politik aliran di level daerah. Pemerintah pusat tidak mampu menegakkan aturan yang menegaskan bahwa masalah agama tetap menjadi kewenangan pusat, karena para elit daerah mengklaim penanganan isu agama di daerah sebagai bagian dari pengaturan ketertiban umum. Karenanya tidak mengherankan dalam kasus bernuansa agama, Pemerintah Pusat sering lepas tangan dan justru menyerahkan penyelesaian urusan agama kepada Pemerintah Daerah. Akhir-akhir ini lahir sejumlah regulasi daerah yang berpotensi diskriminatif dan membatasi hak beragama. Misalnya, di Tasikmalaya, Jawa Barat, muncul gagasan membentuk polisi syariah untuk mengawal regulasi bernuansa agama yang lahir sebelumnya. Desentralisasi seperti ini bila dibiarkan, maka melemahkan jaminan kebebasan beragama. Pada level tertinggi, seperti konstitusi, jika jaminan kebebasan beragama sangat kuat, dan ketika peraturan itu dilakukan oleh institusi pemerintah level daerah seperti kabupaten, kecamatan hingga desa, maka derajat perlindungannya semakin rendah.

De facto, hubungan antar-pemeluk agama di Indonesia selama ini sesungguhnya kondusif dan bernuansa harmonis, namun di era Reformasi yang mendukung kebebasan, muncul pelbagai ekspresi kebebasan yang *kebablasan* (lepas bebas tak terkendali), baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, paham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Iklim tersebut menimbulkan ekspresi kelompok yang berpaham radikal dan intoleran. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun dalam kasus-kasus tertentu penganut paham ini mengatasnamakan kelompok mayoritas.

Hal ini tampak nyata pada level oknum pemerintah di daerah. Karena pertimbangan politik, maka mereka kadang mendukung sikap intoleran kelompok tertentu demi pemenuhan aspirasi kelompok mayoritas. Klaim aspirasi kelompok tersebut tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan karena suatu tindakan intoleran itu sering kali hanya digerakkan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan mayoritas. Untuk itu kebijakan pemerintah daerah yang arif dan adil sangat diperlukan, termasuk menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama.

Tawaran Solusi

Konflik dan intoleransi antarumat beragama umumnya tidak murni disebabkan faktor agama, melainkan faktor politik, ekonomi, atau lainnya, yang kemudian dikaitkan dengan agama.

Sementara yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara intoleran, dangkal dan radikal pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang perijinan serta pendirian rumah ibadah, penyiaran agama dan tuduhan penodaan agama.

Berhadapan dengan peristiwa di atas sekurang-kurangnya ada dua solusi yang ditawarkan dengan menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, penegakan hukum. Pendekatan hukum diberlakukan pada pelaku kekerasan. *Kedua*, pendekatan persuasif. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya sosialisasi paham Islam moderat dan wawasan kebangsaan, serta *counter* terhadap radikalisme. Para ulama dan tokoh Islam dengan dukungan Kementerian Agama serta lembaga terkait perlu melakukan hal ini, antara lain melalui forum-forum sarasehan bagi para tokoh agama dan kaderisasi calon ulama moderat. Sebab, hanya dengan moderasi (*al-wasathiyyah*) inilah bangsa Indonesia yang plural mampu meraih kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan negara yang damai serta demokratis.

Pelbagai kasus konflik dan perselisihan/gesekan sekecil apa pun harus diselesaikan dengan cepat dan bijaksana. Namun, yang lebih mendesak adalah penyelesaian kasus-kasus yang menjadi sorotan dunia internasional, tetapi hingga saat ini belum diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Misalnya, masalah pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, atau pendirian masjid Nur Musafir di Kupang. Demikian pula penanganan pelbagai kasus konflik internal agama, utamanya pengungsian Ahmadiyah di Mataram dan pengungsian Syiah Sampang di Sidoarjo.

Adapun persoalan konflik dan ketegangan internal agama, utamanya Islam, umumnya dipicu perbedaan paham keagamaan dalam hal yang sangat fundamental dan munculnya aliran kepercayaan (*cult*) yang mengaitkan dirinya dengan agama Islam, serta penghinaan agama, seperti kasus Ahmadiyah, Jamaah Salamullah, dan Al-Qiyadah al-Islamiyyah. Sampai kini masalah Ahmadiyah belum terselesaikan sepenuhnya, bahkan di Mataram masih ada pengungsi Ahmadiyah yang ditampung di Asrama Transito sejak 2006 hingga saat ini.

Penyelesaian berbagai peristiwa di atas menuntut komitmen pemda/pemkot terhadap kerukunan serta adanya mediator yang bisa meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam konflik atau perselisihan dengan mengakomodir aspirasi mereka. Selain itu, upaya-upaya pencegahan konflik dilakukan melalui peningkatan dialog antarumat beragama dengan melibatkan para tokoh agama dan FKAUB (Forum Kerukunan Antar-Umat Beragama), sosialisasi pemahaman

keagamaan yang moderat dan menekankan pentingnya toleransi serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, penegakan hukum baik bagi aparaturnegara, tokoh politik, maupun para tokoh agama.

Penutup

Setiap agama mengajarkan dan mengajak pengikutnya untuk saling mencintai, menjadi manusia yang baik, hidup damai serta harmonis. Namun, karena aspek dan kepentingan politik, kekerasan antar- (umat)agama terjadi. Kehidupan beragama diyakini akan harmonis jika unsur politik tidak turut campur di dalamnya. Kepentingan politik biasanya akan merusak keharmonisan antarumat beragama, bahkan bisa menimbulkan kekerasan di antara pengikut agama yang berbeda.

Selain itu, melemahnya penegakan hukum mengakibatkan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kekerasan terhadap kelompok ini masih terjadi meski demokrasi di Indonesia semakin matang. Hal ini akibat lemahnya penegakan hukum yang terus dipertontonkan, utamanya terhadap pelaku kekerasan. Kelompok yang melakukan kekerasan terhadap minoritas sebagai kelompok anti demokrasi, namun mereka memanfaatkan ruang kebebasan demokrasi untuk melakukan anti demokrasi, demikian ditulis dalam *Kompas*, Jumat, 27 Februari 2015.

Kekerasan dan intoleransi atas nama agama harus segera ditindak. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya dalam menganut serta menjalankan agama atau keyakinannya, termasuk mendirikan tempat ibadah dan perijinannya. Harapan kita bersama bahwa RUU Perlindungan Umat Beragama nantinya benar-benar bisa melindungi semua umat beragama dari segala bentuk kekerasan dan intoleransi. Pemahaman dan penafsiran yang dangkal serta salah terhadap sumber ajaran agamanya, bahkan terhadap agamanya sendiri dan orang lain, perlu disingkirkan supaya tidak menjadi pemicu pelbagai tindakan intoleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama serta menganggap diri sebagai kelompok mayoritas.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama dan cinta damai sebagaimana terkandung dalam Alquran serta sunah Nabi SAW. Nabi Muhammad memerlakukan semua masyarakat/umat beragama secara sama, tanpa membedakan. Amalan berbuat baik kepada sesama manusia dan larangan mengganggu umat beragama lain

merupakan prinsip Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Apabila ada orang atau kelompok Islam yang tidak toleran, maka mereka itu benar-benar tidak memahami Islam.

Beberapa Bacaan

Esposito, John L., *Masa Depan Islam, Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat*, terjemahan Eva Y. Nukman dan Edi Wahyu SM, Bandung: Mizan, 2010.

_____, dan Dalia Mogahed, *Saatnya Islam Bicara! Opini Umat Islam tentang Islam, Barat, Kekerasan, HAM, dan Isu-isu Kontemporer Lainnya*, terjemahan Eva Y. Nukman, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.

Galeoti, Anna Elisabetta, *Toleration as Recognition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Ghazali, Abd. Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Alquran*. Jakarta: KataKita, 2009.

Impulse, Tim (ed.), *Mencungkil Sumbatan Toleransi*, Yogyakarta: Kanisius dan Impulse, 2010.

Maarif, Syafii, *Bhinneka Tunggal Ika, Toleransi, dan Alquran*, dalam *REPUBLIKA*, Selasa, 8 Januari 2013.

Masduqi, Irwan (ed.). *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: Mizan Pustaka, 2011.

Misrawi, Zuhairi, *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Jakarta: Fitrah, 2007.

_____, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Suminar, D. Lintang (ed.). *Mencungkil Sumbatan Toleransi*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Wahid, Yenni Zannuba, dkk., *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Intoleransi 2012, 2013, 2014*. Jakarta : The Wahid Institute Seeding Plural and Peaceful.

Abdillah, Masykuri. *Merawat Kerukunan dalam Kompas*, Senin, 12 Januari 2015.

_____, *Meneguhkan Moderasi Beragama dalam Kompas*, Senin, 9 Februari 2015.

&&&&&

***P. Peter B. Sarbini, SVD:** Dosen Filsafat Islam di STFT Malang dan Bendahara Aditya
Wacana Malang.